

BAB II

SEJARAH KOSOVO

Dalam bab ini akan membahas tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Kosovo dari perjuangan masa lalu. Dimana Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Februari 2008, ada beberapa negara yang telah menyetujui dan ada pula yang belum. Menjelaskan tentang keadaan geografis di Kosovo, citra Kosovo dalam dunia Internasional dan hubungan antara Kosovo dengan negara lain.

A. Kondisi Geografis Kosovo

Kosovo adalah sebuah negara republik yang secara de facto merdeka, terletak di bagian sebelah tenggara benua Eropa. Sebelumnya, Kosovo adalah sebuah provinsi di Serbia di bawah administrasi PBB, namun pada tanggal 17 Februari 2008 Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak. Kemerdekaan secara sepihak ini lah yang menimbulkan beberapa reaksi yang berbeda dari berbagai Negara.

Deklarasi ini pun sangat ditentang oleh Serbia, namun didukung oleh negara-negara Barat. Ibukota Kosovo berada di Priština. Kemerdekaan Kosovo telah diakui secara resmi oleh berbagai negara, di antaranya Albania, Amerika Serikat, Britania Raya, Perancis, dan Turki. Negara yang menolak kemerdekaan Kosovo antara lain Republik Rakyat Tiongkok, Rusia, dan Serbia, Vietnam, dan lain-lain. (Central Intelligence Agency)

Kosovo sendiri pada dasarnya merupakan daerah otonomi khusus dari Serbia. Namun, dikarenakan sering terjadinya diskriminasi rasial yang dilakukan oleh Belgrade (Serbia) maka keinginan rakyat Kosovo untuk merdeka atau memisahkan diri (self determination) dari Serbia semakin kuat. Dan sampai pada puncaknya yaitu pada tanggal 17 Februari 2008 akhirnya Kosovo memproklamasikan kemerdekaannya. (Prasetyo, 2015)

Gambar 2 1 Peta Kosovo



Sumber; Source: kosovo-info.com

Mayoritas penduduk Kosovo beretnis Albania (88%) dan etnis Serbia. Etnis lainnya adalah Bosnia, Gorani, Roma, dan Turki, juga komunitas kecil Ashkali, Mesir, dan warga pendatang lainnya. Bahasa resmi Kosovo adalah bahasa Albania dan Serbia. Bahasa Bosnia, Turki, Romani, dan Kroasia juga banyak digunakan. Orang Kosovo juga menggunakan bahasa Inggris Jerman, dan bahasa Eropa lainnya. (Taufiq, 2008)

Kosovo memiliki tujuh kota yang terhitung sebagai negara yang relatif besar. Kosovo yang ber ibukota Pristina , dan memiliki sekitar 200.000 penduduk yang terletak di bagian timur laut Kosovo. Ibukotanya adalah Pristina, dan memiliki sekitar 200.000 penduduk.Kota ini terletak di timur laut Kosovo.

- Prizren, berisi sekitar 175.000 penduduk terletak pada kota Kosovo bagian Selatan. Pusat tradisional pada kota ini adalah sorotan dari pariwisata Kosovo.

- Peja, memiliki sekitar 100.000 penduduk dan terletak di bagian barat. Dalam bahasa Serbia, kota ini disebut Peć. Pemenang medali emas, Majlinda Kelmendi, lahir dan dibesarkan di Peja.
- Gjakova, dekat dengan perbatasan Albania di bagian barat negara itu, memiliki sekitar 90.000 penduduk. Ini adalah kota Kosovar pertama dengan walikota perempuan yang memimpin.
- Gjilan, terletak di sebelah timur Kosovo dan merupakan tempat kelahiran beberapa pemain sepak bola terkenal, beberapa dari mereka bermain untuk Swiss. Sekitar 90.000 orang tinggal di Gjilan.
- Mitrovica, dikenal karena minoritas Serbia yang besar. Kisah-kisah tentang insiden kekerasan ada di surat kabar internasional sekarang dan kemudian. Ada sebuah jembatan di Mitrovica yang memisahkan bagian kota Serbia dan Albania.
- Ferizaj, terletak di bagian selatan Kosovo dan terkenal akan Camp Bondsteel. Menjadi basis militerpangkalan Angkatan Darat AS terbesar di Eropa. Bagian dari distrik Ferizaj adalah resor ski Brezovica.
- Pristina, dan memiliki sekitar 200.000 penduduk. Kota ini terletak di timur laut Kosovo.

Gambar 2 2 Peta wilayah kosovo



Sumber; britannica.com

Kota yang paling utama di Kosovo adalah Pristina, Peja, Prizren dan Gjakova. Mitrovica juga dikenal karena minoritas Serbia yang besar pada daerah tersebut. Kota-kota besar lainnya adalah Gjilan dan Ferizaj. Negara non-pesisir Kosovo berbatasan dengan Albania, Makedonia, Serbia, dan Montenegro. Kosovo dikelilingi oleh Pegunungan Sharr yang terletak di perbatasan tenggara dekat Makedonia. Bagian utara dikelilingi oleh Pegunungan Kaopaonik, sedangkan bagian barat daya Kosovo berbatasan dengan Albania dan Montenegro yang memiliki gunung tertinggi yaitu Gjeravica dengan ketinggian 2.656 m.

Sepanjang wilayah pusat Kosovo merupakan perbukitan yang memiliki dua dataran luas yang tersebar di sisi timur dan barat Kosovo. Pristina adalah Ibukota Kosovo, yang merupakan kota terbesar serta pusat administrasi negara. Kota-kota utama lainnya termasuk: Peja, Gjakova, Prizren, Gjilan, dan Mitrovica saat ini dibagi menjadi dua bagian. Wilayah

dengan pegunungan dan lembah paling banyak adalah wilayah Dukagjini yang terletak dibagian sebelah barat.

Kosovo berlokasi dibagian Eropa Tenggara dengan titik koordinat geografi 42 35 N, 21 00 E. Dengan luas wilayah 10.908 km² / 6777 mil persegi , berbatasan dengan Albania sejauh 112 km, Makedonia 159 km, Montenegro 79 km, Serbia 352 km. Di wilayah Kosovo pun memiliki cekungan fluvial datar dengan ketinggian 400-700 m di atas permukaan laut yang dikelilingi oleh beberapa pegunungan tinggi dengan ketinggian 2.000 hingga 2.500 m.

Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh Kosovo pun berbagai macam diantaranya nikel, timbal, seng, magnesium, lignit, kaolin, krom, bauksit. Secara umum iklim yang ada di Kosovo umumnya adalah dingin, yang relatif kering dan hangat, musim panas yang lembap. Suhu musim panas di daerah pegunungan sangat dingin, rata-rata sekitar (18 ° C) hingga 120 hari dari tutup salju tahunan di pegunungan. Di daerah pegunungan, pohon menutupi 40% atau lebih dari wilayah tersebut, kebanyakan oak dan beech. (Be In Kosovo)

Kosovo memiliki musim panas yang panjang, hangat, dan musim dingin. Antara bulan April dan Oktober adalah bulan yang mengalami suhu yang bagus.. Juni, Juli, dan Agustus memiliki suhu tinggi, secara teratur di atas 30 derajat Celcius. Ada musim semi yang pendek dan musim gugur yang singkat. Pegunungan besar yang ada di Kosovo menyebabkan adanya perbedaan cuaca antara beberapa kota yang ada di sekitar. Kosovo adalah tujuan sempurna bagi mereka yang ingin menikmati keindahan alam dan pemandangan budaya yang indah: air terjun besar, taman nasional, biara-biara kuno, kota-kota tradisional, dan masjid-masjid yang indah. (Kosovo Info)

B. Perjuangan Kemerdekaan Kosovo

Balkan pusat adalah bagian dari Kekaisaran Romawi dan Bizantium sebelum etnis Serbia bermigrasi ke wilayah Kosovo modern pada abad ke-7. Selama periode abad pertengahan, Kosovo menjadi pusat Kekaisaran Serbia melihat banyaknya pembangunan situs agama Serbia yang penting. Termasuk banyak biara Ortodoks Serbia yang secara arsitektur signifikan. Kekalahan pasukan Serbia di Pertempuran Kosovo pada 1389 menyebabkan lima abad kekuasaan Ottoman di mana sejumlah besar orang Turki dan Albania pindah ke Kosovo.

Pada akhir abad ke-19, orang Albania menggantikan Serbia sebagai kelompok etnis yang dominan di Kosovo. Serbia merebut kembali kendali atas wilayah tersebut dari Kekaisaran Ottoman selama Perang Balkan Pertama tahun 1912. Setelah Perang Dunia II, Perbatasan Kosovo didirikan ketika Kosovo menjadi provinsi otonom Serbia di Republik Federal Sosialis Yugoslavia (S.F.R.Y). Meskipun ada konsesi legislatif, nasionalisme Albania meningkat pada tahun 1980-an, yang menyebabkan kerusuhan dan seruan untuk kemerdekaan Kosovo.

Orang-orang Serbia - banyak yang memandang Kosovo sebagai pusat budaya mereka - menetapkan konstitusi baru pada tahun 1989 dengan mencabut status otonomi Kosovo. Para pemimpin Albania Kosovo menjawab pada tahun 1991 dengan menyelenggarakan referendum yang mendeklarasikan kemerdekaan Kosovo. Serbia melakukan tindakan represif terhadap orang-orang Albania Kosovo pada 1990-an, memprovokasi pemberontakan Albania Kosovo.

Mulai tahun 1998, Serbia melakukan kontra pemberontakan yang brutal yang mengakibatkan pembantaian dan pengusiran besar-besaran etnis Albania (sekitar 800.000 etnis Albania diusir dari rumah mereka di Kosovo). Setelah upaya internasional untuk menengahi konflik gagal, operasi

militer NATO selama tiga bulan terhadap Serbia dimulai pada Maret 1999 memaksa Serbia untuk menyetujui penarikan pasukan militer dan polisi mereka dari Kosovo. (Central Intelligence Agency)

Perang pada tahun 1999 dilatar belakangi oleh referendum rakyat Kosovo yang mayoritas menginginkan kemerdekaan dari Serbia, sementara pemerintah Serbia menganggap bahwa referendum tersebut ilegal, dan pada akhirnya Serbia menurunkan pasukannya ke wilayah Kosovo.

Para tentara Serbia membunuh para pejuang Kosovo yang tergabung dalam Kosovo Liberation Army dengan sangat keji, hingga muncullah perlawanan-perlawanan dari rakyat Kosovo. Serbia berusaha untuk menghilangkan etnik Albania di Kosovo. Sengitnya pertempuran tersebut menyebabkan munculnya gelombang pengungsi dari Kosovo ke beberapa wilayah. (Taufiq, 2008)

Kosovo Liberation Army merupakan sebuah kelompok yang didirikan pada awal tahun 1990-an, yang bertujuan untuk memerdeka kan Kosovo dari Republik Federal Yugoslavia dan Serbia, mereka melawan pasukan keamanan, polisi, pejabat pemerintah Yugoslavia dan desa dengan etnis mayoritas Serbia. Organisasi atau kelompok KLA didanai sebagian besar oleh organisasi diaspora Albania dan perdagangan narkoba. NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat mendukung KLA dan mengintervensi Perang Kosovo pada bulan Maret 1999. KLA pun menggunakan Narkoterisme dalam membiayai kegiatannya. (Judiciary, 2003)

Organisasi yang menjadi cikal bakal Tentara Pembebasan Kosovo adalah Gerakan Rakyat Kosovo. Gerakan ini berpandangan bahwa kemerdekaan Kosovo hanya akan didapat melalui perjuangan bersenjata. Gerakan ini didirikan pada tahun 1982, dan memainkan peran penting dalam

penciptaan Kosovo Liberation Army pada tahun 1993. (Judah, 2001)

Salah satu tokoh pendiri Pasukan Pembebasan Kosovo (KLA) adalah Adem Jashari, sebuah organisasi yang ia dirikan merupakan organisasi separatis Albania Kosovo yang memperjuangkan pemisahan diri Kosovo dari Republik Federal Yugoslavia selama 1990-an.

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1244 (1999) menempatkan Kosovo di bawah pemerintahan transisi, Misi Administrasi Sementara PBB di Kosovo (UNMIK), menunggu penentuan status masa depan Kosovo. Proses yang dipimpin PBB dimulai pada akhir tahun 2005 untuk menentukan status terakhir Kosovo. Perundingan 2006-07 berakhir tanpa kesepakatan antara Beograd dan Pristina, meskipun PBB mengeluarkan laporan komprehensif mengenai status akhir Kosovo yang mendukung kemerdekaan.

Pada tanggal 17 Februari 2008, Majelis Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan Kosovo. Sejak itu, lebih dari 110 negara telah mengakui Kosovo, dan telah bergabung dengan banyak organisasi internasional. Pada bulan Oktober 2008, Serbia meminta pendapat penasihat dari Mahkamah Internasional (ICJ) tentang legalitas di bawah hukum internasional deklarasi kemerdekaan Kosovo. ICJ mengeluarkan pendapat penasehat pada bulan Juli 2010 menegaskan bahwa deklarasi kemerdekaan Kosovo tidak melanggar prinsip-prinsip umum hukum internasional, Resolusi Dewan Keamanan PBB 1244, atau Kerangka Konstitusi. Pendapat itu sangat cocok dengan sejarah dan keadaan unik Kosovo. (Central Intelligence Agency)

Kosovo merupakan provinsi dari wilayah negara Serbia yang berada di selatan. Mayoritas penduduknya adalah etnik Albania. Kosovo sendiri menjadi negara keenam yang terbentuk dari bekas federasi Yugoslavia setelah Slovenia,

Kroasia, Makedonia, Bosnia dan Montenegro. Pada hari Minggu 17 Februari 2008 silam, sebuah negara baru bernama Kosovo lahir di wilayah Balkan, Eropa. Pernyataan kemerdekaan tersebut dinyatakan oleh Hashim Thaci, yang bertindak sebagai perdana menteri.(Ginting)

Pada tanggal 17 Februari 2008 Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya secara sepihak. Namun deklarasi ini ditentang oleh Serbia, walaupun ditentang oleh Serbia, Kosovo sendiri masih mendapatkan dukungan oleh Negara-negara lain. Kosovo menjadi tempat pertentangan wilayah yang masih berlangsung antara pemerintah Serbia dan penduduknya yang mayoritasnya merupakan etnis Albania.Saat berdirinya Yugoslavia, Kosovo memang menjadi provinsi dari Serbia dengan status Daerah Otonomi Khusus. (detiknews, 2008)

Republik Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 Februari 2008, pukul 15:49 CET. Para pemimpin yang dipilih secara demokratis dari rakyat dengan suara yang bulat menyatakan Kosovo untuk menjadi independen dari Serbia.Sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Albania, Afghanistan, Australia, dll. Mengakui Kosovo sebagai negara merdeka pada hari-hari berikutnya setelah deklarasi kemerdekaan. Pada Juli 2010, Pengadilan Internasional menolak klaim Serbia bahwa tindakan itu telah melanggar integritas teritorialnya dan “menyimpulkan bahwa deklarasi kemerdekaan pada 17 Februari 2008 tidak melanggar hukum internasional umum”. Berikut adalah daftar negara yang telah mengakui Kosovo sebagai negara independen :Amerika Serikat, Perancis, Afghanistan, Albania, Turki, Inggris, Australia, Senegal, Jerman,dan lain-lain. Ada sekitar 113 Negara yang mengakui adanya kemerdekaan Kosovo hingga tahun 2018. (Be In Kosovo)

Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia di Pristina. Deklarasi ini dibacakan oleh Perdana Menteri

Kosovo yaitu Hashim Thaci pada sidang parlemen yang dihadiri oleh 109 anggota. Sebelumnya Kosovo adalah satu provinsi dibawah kekuasaan Serbia yang mayoritas penduduknya beretnis Albania. Pada September 1992 Kosovo pun sudah pernah menyatakan kemerdekaannya, namun hanya Albania saja yang mengakui kemerdekaan tersebut. Kemerdekaan pada waktu itu tidak berarti apa-apa karena hanya dianggap sebagai bentuk pemberontakan biasa dan Kosovopun kemudian dilanda konflik etnis yang berkepanjangan serta perang melawan Serbia selama 3 tahun antara tahun 1996-1999. Akhirnya Kosovo berada di bawah pengawasan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Melalui Resolusi DK PBB No. 1244 dan Kosovo mendapatkan status provinsi otonom. (Sujadmiko, 2012, p. 183)

Pada saat Kosovo menyatakan kemerdekaannya pada September 1992, Serbia melancarkan aksi militer untuk menumpas gerakan separatisme Kosovo, sampai kemudian NATO ikut campur tangan dan memaksa Serbia menarik pasukannya dari Kosovo pada tahun 1999. Setelah adanya masa transisi, akhirnya Kosovo menyatakan Independensi dari Republik Serbia pada Februari 2008, namun sampai saat ini Serbia tidak mengakui kemerdekaan Kosovo. Bagi pemerintah Serbia, Kosovo masih merupakan daerah otonom mereka. Sebagian negara-negara dunia sudah mengakui Kosovo sebagai negara berdaulat. Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Perancis dan Australia termasuk dari 111 negara anggota PBB yang sudah mengakui kemerdekaan Kosovo. Tapi Serbia, Rusia, Israel dan beberapa puluh negara lain termasuk Indonesia belum mengakui kemerdekaan Kosovo. (Aldriansyah, 2017)

Kosovo sendiri berpenduduk sekitar 2,1 juta jiwa, terdiri dari 90% etnis Albania yang Muslim, 5,3 etnis Serbia yang Katolik Ortodoks, selebihnya etnis Bosnia dan minoritas lain. Ratusan tahun yang lalu sebenarnya etnis Albania adalah merupakan minoritas di Kosovo pada saat masih dibawah kekuasaan Yugoslavia hingga akhirnya pada tahun 1386

Kerajaan Ottoman yang berpusat di Istanbul Turki menaklukkan wilayah ini. Secara berangsur-angsur banyak dari penduduk Kosovo yang semula beragama Kristen Ortodok memeluk Islam. Seiring dengan berjalannya waktu, etnik Albania banyak yang berpindah ke Kosovo sedangkan etnik Serbia berangsur-angsur beralih ke wilayah Utara Serbia akibat tekanan dari Kerajaan Ottoman. (Taufiq, 2008)

Salah satu rintangan yang dihadapi dalam perjalanan proses kemerdekaan Kosovo yaitu adanya penolakan kemerdekaan seperti halnya yang dilakukan oleh China, dimana China menentang kemerdekaan Kosovo dengan alasan China mengkhawatirkan deklarasi itu akan memicu keinginan negara bagian China yaitu Taiwan untuk merdeka. China telah memperingatkan Taiwan yang telah menyampaikan dukungannya kepada kemerdekaan Kosovo. "Semua orang tahu bahwa Taiwan adalah bagian dari China. Oleh karena itu, ia sama sekali tidak berhak menyatakan pengakuan terhadap yang disebut kemerdekaan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Liu Jianchao. (Kompas.com, 2008)

Dalam menempuh perjalanannya demi mendapatkan kemerdekaan, Kosovo pun telah melalui perjalanan ini dengan penuh perjuangan. Kosovo sendiri merdeka dengan adanya banyak dukungan dari Negara-negara barat dan juga Negara mayoritas Eropa. Kosovo menyatakan kemerdekaannya secara sepihak dan sehari setelah menyatakan kemerdekaannya Kosovo pun mendapatkan pengakuan dari Norwegia, Denmark, Finlandia, Swedia, Jerman, Italia, Perancis, Inggris, Australia, Albania, Turki, dan Afghanistan.

Sementara itu, ada beberapa rintangan yang dihadapi oleh Kosovo dalam mendapatkan kemerdekaan. Salah satunya adalah ada beberapa Negara yang menentang atau menolak kemerdekaan Kosovo. Negara tersebut adalah Serbia, Rusia, Spanyol, Rumania, Slovakia, Cyprus, dan lain-lain. Bahkan, Serbia sendiri menarik seluruh diplomatnya dari Negara-negara

yang mengakui kemerdekaan Kosovo. (Sujadmiko, 2012, p. 183)

Berikut merupakan daftar Negara Eropa yang mengakui kemerdekaan Kosovo:

Gambar 2.3 Daftar Negara Eropa yang Mengakui

Albania	Ceko	Irlandia	Monako	Swiss
Andorra	Denmark	Italia	Montenegro	Turki
Austria	Estonia	Latvia	Norwegia	
Belanda	Finlandia	Liechtenstein	Polandia	
Belgia	Perancis	Lithuania	Portugal	
Bulgaria	Jerman	Luxemburg	San Marino	
Britania Raya	Hongaria	Makedonia	Slovenia	
Kroasia	Islandia	Malta	Swedia	

Sumber; <http://www.beinkosovo.com/countries-that-have-recognized-kosovo-as-an-independent-state/>

Gambar 2.4 Daftar Negara Eropa yang tidak Mengakui

Armenia	Cyprus	Rumania	Ukraina
Azerbaijan	Moldova	Spanyol	Kazakhstan
Belarusia	Slovakia	Yunani	Serbia
Bosnia Herzegovina	Georgia	Rusia	Vatikan

Sumber; <http://www.beinkosovo.com/countries-that-have-recognized-kosovo-as-an-independent-state/>

Dalam data yang penulis temukan, dari sekitar 50 negara Eropa ada 34 Negara yang mengakui kemerdekaan Kosovo. Selebihnya menolak kemerdekaan tersebut. Dari Uni Eropa sendiri ada 23 Negara yang mengakui dan 5 Negara tidak. 5 Negara tersebut diantaranya adalah Spanyol, Rumania, Slovakia, Cyprus, dan Yunani. Adanya penolakan inilah menjadi salah satu rintangan yang dihadapi oleh Kosovo. Dari data diatas, menunjukkan bahwa mayoritas Negara Eropa mengakui kemerdekaan Kosovo.

C. Citra Kosovo dalam Dunia Internasional

Mayoritas penduduk Kosovo diisi oleh orang-orang beretnis Albania yaitu sekitar 90% dan beragama Muslim. Lalu diisi oleh etnis Serbia yang beragama Katolik ortodoks, dan selebihnya yaitu etnis Bosnia dan minoritas lainnya. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa resmi Albania dan Serbia. Orang-orang Kosovo juga menggunakan bahasa Inggris Jerman, dan bahasa eropa lainnya. (Taufiq, 2008, p. 14)

Secara geografis Kosovo merupakan kawasan yang dikelilingi oleh Negara-negara anggota Uni Eropa. Negara ini juga merupakan bagian dari Eropa. Penduduk Uni Eropa serta kawasan sekitarnya juga memiliki warisan dan sejarah yang sama, serta masa depan yang ditentukan oleh peluang dan tantangan yang ada. Dalam hal ini, Kosovo memang mengarah pada Eropa dalam menunjukkan citra Negaranya. Dari segi budaya pun dapat dilihat bahwa Kosovo lebih mengarah pada budaya barat. Dilihat juga dari usaha Kosovo yang ingin melangkah lebih jauh dalam jalur Eropa. Dimana Kosovo akan melakukan segala upaya nya agar dapat maju dengan cepat dalam keanggotaan Uni Eropa. (Global Security, 2018)

Dalam bidang kepercayaan, agama mayoritas yang ada di Kosovo memang islam. Tetapi, konstitusi menetapkan bahwa Kosovo merupakan Negara sekuler yang netral dalam hal keyakinan. Tidak memihak pada agama apapun dan juga menjamin kebebasan beragama. Semua orang bebas memilih agama yang akan mereka yakini sesuai hati nurani yang ada dan semua orang pun akan sama di mata hukum. Melihat sensus yang ada pada tahun 2011

menunjukkan bahwa 95,6% populasi yang ada di Kosovo adalah muslim. Sisanya yaitu Kristen ortodoks, Katolik, dan tidak beragama.

Negara yang terletak di bagian tenggara Eropa ini dikenal sebagai Negara islam yang liberal selama beberapa dekade ini dan tidak memiliki agama resmi. Penduduk Kosovo pun berpendapat bahwa agama merupakan urusan pribadi atau privasi bagi mereka dan bukan urusan publik. Dalam hal ini, Kosovo memang mengesampingkan urusan agama meskipun mayoritas penduduknya adalah Muslim. (Sasongko, 2018)

D. Hubungan Kosovo dengan Negara Lain

Setelah tanggal 17 Februari 2008, ketika majelis Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan negara, akhirnya Kosovo memulai kampanye untuk pengakuan Republik Kosovo oleh semua negara dan terciptanya hubungan bilateral dengan negara-negara yang telah mengakui Kosovo. Dalam ruang lingkup perkembangan ini dengan adanya pengakuan paspor Kosovo, dan liberalisasi visa atau bahkan penghapusannya. (Pike, 2017)

Kementerian Luar Negeri Republik Kosovo telah memulai proses untuk membangun hubungan diplomatik dengan semua negara yang telah mengakui kemerdekaan Republik Kosovo, baik dengan membuka misi baru atau melalui akreditasi duta besar non-residen ke negara-negara ini. Dengan adanya ini diharapkan mampu memperbanyak hubungan kerjasama antara Kosovo dengan beberapa negara lain yang mengakui kemerdekaannya. (Republic of Kosovo Ministry of Foreign Affairs)

Hingga 2018 ada sekitar 113 Negara yang mengakui kemerdekaan Republik Kosovo. Adapula beberapa Negara besar yang belum mengakui adanya kemerdekaan Kosovo seperti Rusia, Serbia, China, Spanyol, dan lain-lain. Berikut adalah penjelasan tentang hubungan Kosovo dengan beberapa negara lain;

a. Hubungan Kosovo – Serbia

Kosovo pernah menjadi provinsi di Serbia, di mana Serbia pernah mendiskriminasi dan mengecualikan Kosovo dari etnis Albania di seluruh akhir abad ke-20. Dikecualikan dari sistem pendidikan dan administrasi, Kosovo berjuang keras dan keras untuk kemerdekaan mereka.

Setelah lebih dari 800.000 orang Kosovo dipaksa untuk mencari perlindungan di negara-negara tetangga dari 1989 hingga 1999, NATO secara militer melakukan intervensi terhadap pasukan gabungan Yugoslavia dan Serbia. Setelah tiga bulan serangan udara NATO, pasukan Yugoslavia dan Serbia menarik diri dari Kosovo dan AS diberi wewenang untuk memfasilitasi proses politik untuk menentukan masa depan status Kosovo. Sejak akhir perang, hubungan antara Kosovo-Serbia penuh dengan pertikaian dan ketegangan.

Orang-orang Serbia yang berada di Kosovo memilih untuk tidak banyak berinteraksi dengan penduduk lain yang ada di Kosovo dan orang-orang Serbia pun memilih untuk menjaga hubungannya dengan Serbia dan pemerintahan mereka. Contohnya seperti kurangnya integrasi antar keduanya seperti sekolah Serbia dan sekolah Kosovo di Kosovo. Kedua sekolah ini mengajarkan versi yang berbeda dengan apa yang terjadi antara 1989-1999 peristiwa terdahulu mereka menceritakan

dengan versi mereka sendiri. Sekolah tersebut mengajarkan bahasa yang berbeda, Kosovo mempelajari bahasa Albania sedangkan dan Serbia mempelajari bahasa Serbia dan tidak saling berinteraksi. Hal ini telah menciptakan adanya lingkaran permusuhan antara dua etnis dan negara. Setelah bertahun-tahun mengalami penderitaan diskriminasi sistematis, hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri berlaku; pada 2008, Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya dan menjadi negara terbaru di Eropa pada Februari 2008.

Konflik panjang dan pelik mewarnai hubungan antara Kosovo dan Serbia. Secara demografi, selain penduduk etnis Serbia, Kosovo juga dihuni oleh kelompok masyarakat etnis Albania. Keduanya dipisahkan oleh perbedaan agama yang dianut. Kelompok masyarakat etnis Albania mayoritas beragama Islam sejak pengaruh kekhalifahan Utsmaniyah Turki, sedangkan etnis Serbia memeluk Kristen Ortodoks Timur.

Munculnya permasalahan baru antara Kosovo dan Serbia mulai memanas setelah kereta Serbia bertuliskan "Kosovo adalah Serbia" hendak melintasi perbatasan. Sejak berabad-abad lalu, kondisi dua daerah ini memang pelik. Ada konflik lama terkait perbedaan agama dan etnis. Sebuah kereta Serbia berangkat dari Belgrade menuju Kosovo. Sampai di perbatasan antara Serbia dan Kosovo, kereta tersebut dihentikan oleh pemerintah Kosovo, 4 Januari lalu. Alasannya: kereta itu dicat dengan bendera Serbia dan dinding-dindingnya dihiasi gambar keagamaan Ortodoks Serbia, juga dibubuhi kata-kata "Kosovo adalah Serbia."

Pada akhirnya Kosovo telah mengerahkan pasukan polisi di sepanjang perbatasan untuk mencegah penyeberangan

kereta lebih lanjut dan memaksa Presiden Nikolić untuk menghentikan layanan kereta di jalur tersebut. Kereta itu menjangkau wilayah Kosovo yang masih banyak dihuni etnis Serbia.

Wilayah Kosovo sendiri memang telah mendeklarasikan kemerdekaannya lepas dari Serbia pada 2008 lalu. Namun, Serbia dan sekutunya Rusia masih belum mengakui pemisahan diri yang dilakukan Kosovo ini. Serbia masih berupaya mengintegrasikan wilayah bekas provinsinya ini.

Bahkan, deklarasi kemerdekaan Kosovo pada 17 Februari 2008 berbuntut protes pemerintahan Serbia. Mereka melancarkan aksi untuk memerangi deklarasi Kosovo, antara lain mengingatkan para duta besarnya untuk protes di berbagai negara yang mulai mendukung kemerdekaan Kosovo. Hubungan antara Kosovo dan Serbia masih relatif tidak stabil. Pembicaraan baru-baru ini antara kedua negara telah difasilitasi dengan harapan mencapai resolusi damai. (Borgen Project, 2018)

b. Hubungan Kosovo – Albania

Hubungan Albania-Kosovo (Albania: Marrëdhëniet Shqiptaro-Kosovare) merujuk pada hubungan budaya dan sejarah Albania dan Kosovo. Albania memiliki kedutaan besar di Pristina dan Kosovo memiliki kedutaan besar di Tirana. Ada 1,6 juta orang Albania yang tinggal di Kosovo - resmi 92,93% dari seluruh populasi Kosovo - dan Albania adalah bahasa resmi Kosovo. (New kosovo Report, 2008)

Pada tahun 1992 Albania adalah satu-satunya negara yang parlemennya memilih untuk mengakui Republik Kosovo, yang telah dinyatakan independen pada tahun 1991. Dukungan resmi terbatas pada deklarasi. Pada tahun 1994, ketika konflik Bosnia memuncak, Albania mundur selangkah dengan mengakui perbatasan Yugoslavia, termasuk Kosovo. (Bieber & Daskalovski, 2003)

Kementerian Luar Negeri Albania, dalam catatan klarifikasi ke Serbia, mengatakan: "Albania menganggap negara merdeka Kosovo sebagai faktor perdamaian dan stabilitas di wilayah Balkan, sedangkan kemerdekaannya dianggap sebagai langkah yang jelas untuk melayani masyarakat, stabilitas dan perspektif Eropa dari wilayah ". Ia juga mengatakan bahwa kebijakan luar negeri Republik Albania "didasarkan pada tujuan bersama integrasi Euro-Atlantik negara itu, Republik Kosovo dan seluruh wilayah.Pada Oktober 2011, sebuah kesepakatan dicapai antara Kementerian Kebudayaan Kosovo dan Albania tentang penggunaan umum kedutaan dan layanan konsuler. (Setimes.com, 2011)

Ketika Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia pada 17 Februari 2008, Albania menjadi salah satu negara pertama yang secara resmi mengumumkan pengakuannya atas Republik Kosovo yang berdaulat.

c. Hubungan Kosovo – Amerika Serikat

Amerika Serikat merupakan salah satu negara besar yang sangat mendukung Kosovo untuk mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Februari 2008. Kosovo memulai babak baru setelah hampir 10 tahun pemerintahan PBB mengikuti intervensi NATO pada 1999. Amerika Serikat

dan Kosovo menjalin hubungan diplomatik pada 18 Februari 2008. Christopher W. Dell tiba di Pristina pada Agustus 2009 sebagai Duta Besar AS kedua untuk Kosovo. Presiden Barack Obama menerima surat kepercayaan untuk duta besar pertama Kosovo untuk Amerika Serikat, Avni Spahiu, pada November 2009. (Global security, 2017)

Hubungan yang dijalin oleh Amerika Serikat dan Kosovo telah berlangsung lama, sebelum Kosovo memdeklarasikan kemerdekaan mereka pada 17 Februari 2008. Amerika Serikat merupakan salah satu Negara yang memberikan dukungannya serta ikut berpartisipasi atas pencapaian terbesar masyarakat Kosovo.

Hubungan antara Amerika Serikat dan Kosovo sudah terjalin sebelum kemerdekaan Kosovo dideklarasikan. Amerika Serikat bisa dikatakan memiliki andil yang cukup besar dalam pencapaian terbesar masyarakat Kosovo. Hubungan diplomatik pun berlanjut pada tahun 2008 setelah deklarasi kemerdekaan Kosovo lepas dari Serbia. Bantuan- bantuan yang diberikan Amerika Serikat pun bukan hanya dalam bentuk materi tapi juga dalam bentuk dukungan moral.

Amerika Serikat juga sangat berperan penting dalam pemulihan Kosovo, dalam bidang perekonomian maupun di bidang keamanan. Amerika Serikat juga memprioritaskan kebijakan mereka untuk mendorong adanya pertumbuhan perekonomian Kosovo melalui sektor swasta. Bertugas untuk memastikan bahwa masyarakat dan pemerintah Kosovo taat pada hukum yang sudah dibuat, sehingga Kosovo akan menjadi negara yang nyaman bagi semua bangsa. (Febriani, 2014, pp. 3-4)

Pada tahun 1996 merupakan tahun pertama bagi Amerika Serikat untuk membuka kantor layanan informasi A.S. di Kosovo. Sekitar tahun 1998 dan 2008, kantor A.S di Pristina beroperasi sebagai misi diplomatik Amerika Serikat di Kosovo. Setelah adanya kemerdekaan yang diraih oleh Kosovo pada tahun 2008, Amerika Serikat secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Kosovo dan kantor tersebut menjadi kantor kedutaan.

Pada bulan September 2012, Amerika Serikat bergabung dengan mitra kelompok pengarah internasional dalam mengakui kemajuan yang luar biasa yang telah dicapai oleh Kosovo, termasuk menjunjung tinggi komitmennya untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam rencana utusan khusus Ahtisaari dan mengabadikannya ke dalam hukum Kosovo, dengan demikian menyatakan akhir kemerdekaan yang diawasi dan pembubaran Kantor Sipil Internasional.

Sejak tahun 1999, Amerika Serikat telah memberikan kontribusi pasukan kepada pasukan kosovo yang dipimpin oleh NATO, yang ditugaskan untuk memelihara lingkungan yang aman dan terlindungi dan kebebasan bergerak untuk semua warga Kosovo. Amerika Serikat juga menyumbangkan staf untuk misi hukum Uni Eropa atau yang dikenal dengan EULEX sejak penempatannya pada tahun 2008, menandai pertama kalinya Amerika Serikat berpartisipasi dalam misi Keamanan Bersama dan Kebijakan Pertahanan Uni Eropa.

Pemerintah AS telah menginvestasikan sekitar \$ 2 miliar di Kosovo sejak 1999, dan saat ini sedang membangun gedung Kedutaan baru yang bernilai jutaan dolar dan dijadwalkan akan dibuka pada 2018. (US Embassy In Kosovo)

Prioritas kedutaan saat ini adalah memastikan peningkatan aturan hukum dan pemerintahan yang memenuhi kebutuhan warga negara; memastikan Kosovo memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif yang mendukung stabilitas dan integrasinya dengan Eropa; memastikan Kosovo berkontribusi positif terhadap stabilitas regional, termasuk dengan secara legal mengubah sektor keamanannya, melawan ekstremisme yang keras, mempromosikan hak-hak minoritas, dan berintegrasi ke dalam struktur Euro-Atlantik.

Sejak 2011, Uni Eropa (UE) telah memfasilitasi dialog antara Serbia dan Kosovo tentang masalah-masalah praktis untuk meningkatkan kehidupan warga negara dan memajukan mereka dalam perspektif Eropa mereka, sebuah proses yang didukung oleh Amerika Serikat. Pada tanggal 5 Mei 2014, Kosovo dan Uni Eropa bersama-sama menyatakan negosiasi tentang Perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi telah selesai, salah satu langkah kunci menuju keanggotaan di Uni Eropa. Perjanjian tersebut ditandatangani pada Oktober 2015, dan diratifikasi oleh parlemen Kosovo pada 2 November 2015.

Selain itu Amerika Serikat memiliki agen bantuan luar negeri yang bernama Millennium Challenge Corporation (MCC) adalah agen bantuan luar negeri A.S. yang inovatif dan independen yang membantu memimpin perjuangan melawan kemiskinan global. Dibuat oleh Kongres AS pada Januari 2004 dengan dukungan bipartisan yang kuat, MCC mengubah pembicaraan tentang cara terbaik untuk memberikan bantuan asing AS yang cerdas dengan berfokus pada kebijakan yang baik, kepemilikan negara, dan hasil. Pada bulan Desember 2015, Dewan Direksi MCC memilih Kosovo yang memenuhi syarat untuk mengembangkan sebuah compact. (US Embassy In Kosovo)

Dalam proses menuju kemerdekaannya, Amerika Serikat sangat membantu Kosovo dalam berbagai hal, misalnya dalam penyediaan pasukan tentara yang ditempatkan di Kosovo untuk melindungi Kosovo dari serangan – serangan yang Serbia. Peran dalam bidang ekonomi dan keamanan pun telah diberikan oleh Amerika Serikat sebelum Kosovo mengalami kemerdekaan. (Febriani, 2014)

d. Hubungan Kosovo – Uni Eropa

Uni Eropa adalah sebuah organisasi yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan serta stabilitas keamanan di kawasan Eropa terutama pada Eropa Barat dan Tengah. Wujud nyata peran penting Eropa dalam segi ekonomi dan keamanan adalah munculnya kebijakan – kebijakan Uni Eropa terkait masalah keamanan. Uni Eropa pun ikut andil dalam penyelesaian konflik Kosovo dibawah wewenang PBB, misi keamanan tersebut sudah terlihat sejak awal proses kemerdekaan Kosovo. Setelah Kosovo mencapai kemerdekaannya, misi keamanan tersebut tidak berhenti begitu saja, karena Uni Eropa merupakan sebuah organisasi kawasan utama di Eropa yang mengambil bagian penting sebagai peace keeping di Kosovo dengan membentuk (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) atau dikenal dengan sebutan EULEX. (Sebayang, 2016)

Pada tanggal 12 Februari 2018 komisi strategi perluasan Eropa untuk Balkan barat menyatakan bahwa “Kosovo memiliki peluang untuk kemajuan berkelanjutan melalui penerapan Perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi dan untuk maju di jalur Eropa ketika keadaan memungkinkan”

Balkan barat sendiri merupakan bagian dari Eropa, secara geografis Balkan barat dikelilingi oleh negara anggota Uni Eropa. Penduduk Uni Eropa serta kawasannya memiliki warisan dan sejarah yang sama, dan masa depan yang ditentukan oleh peluang dan tantangan yang ada. “Negosiasi aksesinya sudah berjalan dengan baik bersama Montenegro dan Serbia. Dengan adanya kemauan politik yang kuat, pengiriman reformasi yang nyata dan berkelanjutan, dan solusi definitif untuk perselisihan dengan tetangga, mereka berpotensi siap menjadi anggota dalam perspektif 2025.

27 Negara anggota dalam Uni Eropa telah setuju dengan adanya prinsip bahwa keanggotaan Serbia dan Kosovo diinginkan dan itu adalah sesuatu yang akan diupayakan oleh Uni Eropa. Brussels menuntut sebagai prasyarat untuk keanggotaan bahwa Beograd harus mengembalikan hubungan dengan Pristina kembali normal. Pada tanggal 12 Maret 2011, Uni Eropa memfasilitasi dialog antara Serbia dan Kosovo yang bertujuan untuk mempromosikan kerjasama dan hubungan bertetangga yang baik. Mencapai kemajuan yang diinginkan menuju Eropa, dan meningkatkan kehidupan masyarakat.

Pada Desember 2011, kesepakatan telah dicapai tentang masalah-masalah termasuk prangko bea cukai, ijazah universitas, catatan sipil, catatan tanah, dan kebebasan bergerak lintas batas. Para pihak yang ada pun juga telah mencapai kesepakatannya tentang manajemen perbatasan terintegrasi, yang implementasinya menunggu kesimpulan dari protokol teknis.

Ada sedikit peluang bahwa Kosovo akan dapat maju dengan cepat pada keanggotaan Uni Eropa dan standar pemerintahan yang serupa seperti yang ada di seluruh Eropa.

Kosovo memiliki sedikit pengalaman dalam administrasi, dan sedikit gagasan tentang apa yang diperlukan untuk berintegrasi dengan norma-norma Eropa. Institusi Negara sangat lemah dan implementasi legislasi pun buruk. Pada 2009 Kosovo bahkan belum mencapai tahap di mana perjanjian fasilitasi visa dengan Uni Eropa. Kosovo menjadi frustrasi karena mereka berpikir tinggi tentang diri mereka sendiri dan cenderung menyalahkan orang lain atas kegagalan mereka.

Laporan Kemajuan di Kosovo adalah bagian dari enlargement package 2013 atau konteks perluasan jumlah anggota Uni Eropa yang diadopsi oleh Komisi Eropa pada 16 Oktober 2013. Komisi menyimpulkan bahwa 2013 telah menjadi tahun bersejarah bagi Kosovo dalam perjalanannya ke Uni Eropa. Kosovo telah berkomitmen pada dialog dengan Serbia yang telah difasilitasi oleh Uni Eropa dan menyampaikan reformasi kebijakan penting yang diidentifikasi dalam studi kelayakan. Uni Eropa menghargai upaya-upaya ini dengan menyetujui dimulainya negosiasi tentang Perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi dengan Kosovo.

Kosovo telah meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi proses-prioritas integrasi Eropa dengan menindaklanjuti prioritas jangka pendek yang diidentifikasi oleh studi kelayakan melalui (aturan hukum, administrasi publik, perlindungan minoritas dan perdagangan) dan dengan menyiapkan negosiasi pada perjanjian stabilisasi dan asosiasi dalam konteks dialog liberalisasi visa, Kosovo mengamandemen dan mengadopsi undang-undang penting, termasuk undang-undang tentang suaka, pendanaan partai, dan perdagangan manusia. Pada Januari 2013, undang-undang tentang pengadilan dan penuntutan mulai berlaku, memperkenalkan pengadilan baru dan struktur penuntutan.

Komisi menggarisbawahi perlunya menjaga hubungan normal dengan Serbia dan terus membangun Kosovo yang inklusif. Upaya lebih lanjut diperlukan pada Kosovo untuk memenuhi tantangan agenda reformasi Eropa mengingat Perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi. Bidang-bidang prioritas meliputi aturan hukum, peradilan, administrasi publik, reformasi pemilihan umum dan Majelis, hak asasi manusia dan fundamental, perlindungan minoritas, masalah perdagangan dan pasar internal, dan masalah phytosanitary dan veteriner.

Secara khusus, Kosovo perlu memperbaiki lingkungan bisnisnya, mendukung sektor swasta dan mengatasi kelemahan struktural di pasar tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran.

Kosovo telah membuat kemajuan dalam mempersiapkan negosiasi untuk Perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi. Menyelesaikan restrukturisasi pada kementerian perdagangan dan industri dalam menyelesaikan analisis dampak dengan mempertimbangkan negosiasi pada aspek-aspek terkait perdagangan dari Perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi. Kosovo juga telah mengambil langkah untuk mempersiapkan di bidang sensus pertanian. Dalam berbagai bidang teknis, undang-undang yang diperlukan ada di tempat dan Kosovo pun siap memulai proses negosiasi.

Upaya lebih lanjut yaitu diperlukannya untuk fokus pada implementasi kerangka hukum khususnya di bidang perdagangan, persaingan dan pasar internal. Kosovo perlu meningkatkan upayanya dalam memerangi perdagangan ilegal dan penyembelihan hewan. Perlu memperkuat kontrol di pasar ternak untuk meningkatkan statistik bisnis, keamanan pangan, dan kontrol phytosanitary. Di sektor energi, upaya untuk

menonaktifkan pembangkit listrik Kosovoperlu ditingkatkan. (Global Security, 2018)

Perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi (SAA) ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 2015 oleh Federica Mogherini, Perwakilan Tinggi untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan / Wakil Presiden Komisi Eropa, dan Johannes Hahn, Komisararis Kebijakan Lingkungan Eropa dan Negosiasi Pembesaran, untuk Uni Eropa, sementara untuk Kosovo itu ditandatangani oleh Perdana Menteri Isa Mustafa dan Menteri Integrasi Eropa Bekim Collaku. SAA sendiri dinegosiasikan antara 2013 Oktober dan 2014 Mei, ditandatangani pada 27 Oktober 2015 dan secara resmi disimpulkan pada 12 Februari 2016 dan mulai berlaku pada 1 April 2016.

SAA menetapkan hubungan kontrak yang memerlukan saling hak dan kewajiban dan mencakup berbagai sektor. Ini akan mendukung pelaksanaan reformasi dan akan memberi Kosovo kesempatan untuk bergerak lebih dekat ke Eropa.

Uni Eropa akan terus mendukung kemajuan Kosovo di jalur Eropa melalui proses Stabilisasi dan Asosiasi, kebijakan yang dirancang oleh Uni Eropa ditujukan untuk mendorong kerjasama dengan negara-negara Balkan Barat serta kerjasama regional. Perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi adalah komponen inti dari proses ini. Untuk mendukung reformasi yang diperlukan, Uni Eropa pun menyediakan bantuan pra-aksesi ke Balkan Barat dan Turki sebesar € 11.7 miliar selama periode 2014-2020, di mana € 645.5 juta dialokasikan ke Kosovo.

Menurut Federica Mogherini, perjanjian ini akan membuka babak baru dalam hubungan antara Kosovo – Uni Eropa dan sebagai kontribusi penting bagi perdamaian,

stabilitas dan kemakmuran di Kosovo dan daerah pada umumnya.

SAA berfokus pada penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi kunci dan elemen inti yang berada di jantung dari pasar tunggal Uni Eropa. SAA akan membangun daerah yang memungkinkan untuk perdagangan bebas dan penerapan standar Eropa di daerah lain seperti kompetisi, bantuan negara dan properti intelektual. Ketentuan lain meliputi dialog politik, kerja sama dalam berbagai sektor mulai dari pendidikan dan pekerjaan untuk energi, lingkungan dan keadilan dan urusan rumah. (eureporter, 2016)

Perkembangan keanggotaan Uni Eropa merupakan sebuah bukti yang konkrit bahwa misi dari Uni Eropa dalam memperluas anggotanya merupakan hal yang pasti dan berjalan dengan sangat baik. Perluasan keanggotaan ini sangat berpengaruh bagi kekuatan dan eksistensi Uni Eropa kedepannya. Salah satu misi Uni Eropa untuk memperluas keanggotaan organisasi adalah dengan menambah anggota organisasikawasan ini bukan hanya di Eropa Barat dan Eropa Tengah saja melainkan juga kepada Eropa Timur dan Negara – Negara Balkan. Hal ini dilakukan tentunya untuk memperkuat dan membangun masyarakat ekonomi Eropa atau yang dikenal dengan MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa). Uni Eropa ingin menciptakan sebuah pasar tunggal bagi benua Eropa yang didominasi serta dipimpin oleh Uni Eropa. (Sebayang, 2016)

e. Hubungan Kosovo – Rusia

Rusia termasuk salah satu negara yang tidak mendukung kemerdekaan bekas provinsi Serbia yaitu Kosovo. Bagi pemerintahan Rusia, adanya kemerdekaan Kosovo dapat

membahayakan stabilitas kawasan dan Internasional. Kemerdekaan tersebut dapat memicu munculnya negara separatis baru lainnya yang dapat mengganggu stabilitas keamanan kawasan dan internasional. (Mulhaj, 2008)

Menurut perspektif Rusia, bekas Yugoslavia dan Serbia pada khususnya merupakan sesuatu yang mirip secara geopolitik sejak invasi pertama Yugoslavia oleh AS dan NATO. Yugoslavia menjabat sebagai blueprint pertama untuk taktik invasi agresif AS / NATO yang berbasis kemanusiaan. Sebuah blueprint yang sejak saat itu digunakan di Irak, Afghanistan, Libya dan negara-negara lain. Serbia merupakan invasi pertama dan sebagai kelinci percobaan sejak pembantaian besar-besaran (Srebrenica), hingga pengambil alihan wilayah kekuasaan.

Menurut Rusia, masalah kemerdekaan Kosovo harus diselesaikan hanya dalam kerangka prinsip-prinsip PBB, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan setelah bertemu dengan rekannya dari Serbia yaitu Tomislav Nikolic pada 11 September 2012. “ sangatlah penting dalam mencari solusi untuk permasalahan dalam proses negosiasi berdasarkan pada pada Resolusi Dewan Keamanan PBB 1244” yang dikatakan Putin pada konferensi pers bersama dengan Nikolic.

Presiden Kosovo menuduh Rusia memprovokasi ketegangan baru di wilayah tersebut. Hashim Thaci mengatakan pada tanggal 29 Januari 2017 "Serbia mengadopsi gaya dan metode yang digunakan Rusia di Ukraina. Ada orang Rusia di sana yang bekerja sama erat dengan Beograd. Mereka sedang dalam proses mempersiapkan unit paramiliter. Mereka belum memiliki seragam, tetapi mereka dipersenjatai dengan pistol modern. Itu pun sedang dikendalikan langsung oleh pihak

berwenang di Beograd. Saya sudah menyampaikan kekhawatiran saya ke UE. Hal serupa juga terjadi pada tahun 1990-an di Bosnia, Kroasia, dan Kosovo. Kami melihat apa akibatnya. Itu sebabnya UE harus mengingat pola perilaku Beograd sebelumnya, yang tidak berbeda dari yang ada saat ini.

"

Rusia mendukung Serbia dalam pembicaraannya tentang masalah Kosovo dan berharap mereka akan menghasilkan solusi yang layak dan dapat diterima bersama berdasarkan Resolusi PBB 1244, Presiden Vladimir Putin menyatakan hal ini setelah bertemu dengan rekannya dari Serbia Tomislav Nikolic di kota Sochi di Laut Hitam 24 Mei 2013. "kami mendukung teman-teman Serbia kami yang kini memimpin perundingan yang dimediasi oleh Uni Eropa tentang Kosovo yang sulit dan menantang tentang Kosovo di Brussels" kata Putin, Rusia juga akan membantu Serbia untuk mendanai cabang pipa gas South Stream yang mengangkut gas Rusia ke Eropa. Rusia akan mengalokasikan sekitar 1,7 miliar euro untuk pembangunan yang dijadwalkan untuk akhir tahun 2013.

Rusia berharap bahwa pembicaraan antara Beograd dan Pristina dengan mediasi Uni Eropa akan mengarah pada peningkatan situasi Serbia di Kosovo. Hal ini dinyatakan oleh utusan PBB untuk PBB Vitaly Churkin pada pertemuan Dewan Keamanan tentang penyelesaian Kosovo 15 Juni 2013. "Kami berharap bahwa hasil yang dicapai selama dialog yang dimediasi UE antara Beograd dan Pristina akan mengarah pada perbaikan nyata situasi dengan populasi Serbia di Kosovo. Kami mendukung upaya Serbia dalam proses yang sulit ini. Tuntutannya untuk jaminan kehidupan normal bagi minoritas Serbia di wilayah tersebut sepenuhnya dibenarkan," - katanya.

Kosovo tidak dapat dipandang sebagai negara yang layak untuk menjadi anggota badan budaya PBB (UNESCO) karena tidak memiliki kepribadian yuridis yang lengkap, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan pada tanggal 9 November 2015. Kosovo sebelumnya berhasil mengumpulkan 92 suara yang mendukung aksesnya ke UNESCO, hanya beberapa suara pendek dari mayoritas dua pertiga yang dibutuhkan. Sebanyak 142 delegasi memilih, sementara 29 lainnya abstain. "Kosovo, yang masih berada di bawah pemerintahan transisi PBB (UNMIK), tidak dapat dipandang sebagai negara yang memiliki kepribadian yuridis dan, oleh karena itu, tidak dapat mengusahakan keanggotaan dalam organisasi internasional," kata kementerian Rusia dalam sebuah pernyataan.

Rusia berhubungan dengan Beograd atas eskalasi situasi antara Serbia dan Kosovo, Direktur Kementerian Departemen Eropa Keempat Rusia Alexander Botsan-Kharchenko mengatakan pada tanggal 08 Februari 2017. "Tentu saja, kami berhubungan setiap saat. Interaksi dengan Beograd juga intensif dalam masalah yang berkaitan dengan upaya melawan untuk mendorong Kosovo ke dalam organisasi internasional," kata Botsan-Kharchenko. Botsan-Kharchenko menambahkan bahwa Beograd memainkan peran utama dalam upaya diplomatik sementara Rusia membantu.

Selama pertemuan mereka di Beograd pada 21 Februari 2017, kepala Kantor Pemerintah Serbia untuk Kosovo Marko Djuric dan duta besar Rusia untuk Serbia Alexander Chepurin berbicara tentang persiapan untuk pertemuan reguler berikutnya bersama Dewan Keamanan PBB di Kosovo dan Metohija, serta tentang aksi bersama untuk mencegah keanggotaan Kosovo dalam organisasi internasional. Ini berarti bahwa peluang Rusia

untuk mengakui Kosovo yang diproklamkan sendiri hampir tidak ada. (Global security, 2017)